

SKRIPSI

**PERAN DINAS TENAGA KERJA
BIDANG KOPERASI DAN UMKM DALAM PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN PUSAT KULINER CEMPAE KOTA PAREPARE**



OLEH :

TZAZA AULIA SYAFIRA

NIM : 19.2400.089

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERAN DINAS TENAGA KERJA
BIDANG KOPERASI DAN UMKM DALAM PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN PUSAT KULINER CEMPAE KOTA PAREPARE**



OLEH

**TZAZA AULIA SYAFIRA
NIM. 19.2400.089**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi Dan
UMKM Dalam Pengembangan Pengelolaan Pusat
Kuliner Cempae Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Tzaza Aulia Syafira
NIM : 19.2400.089
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam, Nomor :
B.3211/ln.39.8/PP.00.9/08/2022

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama : Dr. Usman, M. Ag
NIP : 197006272008011010

Pembimbing Pendamping : Ismayanti, M. M
NIDN : 2021068102

Mengetahui :
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi Dan Umkm Dalam Pengembangan Pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Tzaza Aulia Syafira
NIM : 19.2400.089
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Nomor : B.3211/ln.39.8/PP.00.9/08/2022
Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Usman, M. Ag

(Ketua)

Ismayanti, M. M

(Sekretaris)

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

(Anggota)

Darwis, SE.,M.Si

(Anggota)

Mengetahui :

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Bismawati dan Ayahanda Hadiman Asnandi tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah do'a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Usman, M.Ag. dan Ibu Ismayanti SE., MM selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan media belajar di IAIN Parepare menuju ke arah lebih baik.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Suami saya tercinta Muhammad Agung Shabir yang telah mendukung, menemani, dan menyemangati setiap langkah saya untuk mendapatkan gelar sarjana ini.
5. Kedua saudara kandung saya Muhammad Uways Al-Qarni dan Anienditha Khilyatun Nizwah yang senantiasa telah memberi semangat, do'a yang tiada henti-hentinya.
6. Mertua saya Hj. Roswati Saud dan Muhammad Shabir Umar yang turut serta menyemangati, memberikan doa dan nasihat.
7. Keluarga saya, paman, tante dan sepupu saya yang turut memberikan doa dan dukungan agar dapat menyelesaikan studi ini.
8. Sahabat dan teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberi arahan dan motivasi.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 28 Juli 2023

10 Muharram 1445 H

Penulis



Tzaza Aulia Syafira

Nim. 19.2400.089

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tzaza Aulia Syafira

NIM : 19.2400.089

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 12 Agustus 2001

Program Studi : Ekonomi Syariah

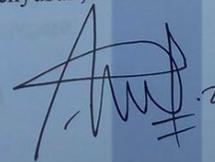
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi Dan UMKM Dalam Pengembangan Pengelolaan Pusat Kuliner Cempae

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Juli 2023

Penyusun,



Tzaza Aulia Syafira

NIM. 19.2400.089

ABSTRAK

Tzaza Aulia Syafira, *Peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi Dan UMKM Dalam Pengembangan Pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare* (dibimbing oleh Usman dan Ismayanti)

Peraturan pemerintah (pp) nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan aturan turunan dari UU cipta kerja. Berdasarkan peraturan tersebut, maka dalam suatu daerah perlu adanya pendampingan berupa kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran, kendala yang dihadapi, dan solusi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare. Subjek penelitian dari pelaku usaha dan pegawai Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM. Adapun analisis data yang digunakan yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, kesimpulan. Teori yang digunakan yaitu Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), peranan, pengembangan dan pengelolaan UMKM.

Hasil analisis penelitian peran Dinas Tenaga Kerja, Bidang Koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare yaitu melakukan kegiatan untuk pengembangan pengelolaan usaha seperti pembinaan, pendampingan usaha dan izin usaha, memberikan program sertifikasi halal gratis, memberikan fasilitas berupa lods untuk berjualan, memberikan bantuan alat pendukung usaha, dan berbagai program pelatihan sebagai bentuk edukasi untuk pelaku usaha khususnya di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

Kata kunci : Peran, Pengembangan, Pengelolaan, UMKM

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	13
1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	13
2. Peranan	27
3. Pengembangan dan Pengelolaan UMKM.....	40
C. Kerangka Konseptual	46
D. Kerangka Pikir	51
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	54
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	54
C. Fokus Penelitian	55
D. Jenis Dan Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data	55
F. Uji Keabsahan Data	59
G. Teknik Analisis Data	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63

A. Hasil Penelitian	63
B. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	74
A. Simpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN – LAMPIRAN	82
BIODATA PENULIS	94



DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Tabel Penelitian Relevan	11



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	52



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare	83
2.	Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84
3.	Surat Keterangan Telah Meneliti dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Parepare	85
4.	Pedoman Wawancara	86
5.	Surat Keterangan Wawancara	88
6.	Foto Dokumentasi Wawancara	91
7.	Data Penerima Bantuan Lods Cempae	93
8.	Biodata Penulis	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. UMKM memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas perekonomian. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.¹ Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan UMKM terhadap pemulihan ekonomi nasional sangatlah berdampak, UMKM menjadi hal yang perlu diperhatikan secara massif oleh pemerintah.

Peraturan pemerintah (pp) nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan aturan turunan dari UU cipta kerja.² Berdasarkan peraturan pemerintah atas turunan undang-undang cipta kerja tersebut, maka dalam suatu daerah perlu adanya pendampingan berupa kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap suatu usaha di daerah tersebut. UMKM memiliki peranan yang amat penting dalam pertumbuhan ekonomi karna UMKM memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Adanya peraturan tersebut berfungsi untuk

¹ .Kementrian Kordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia siaran pers HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022

² Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

memberikan pembinaan, fasilitas, terhadap pelaku UMKM. Dengan Peraturan pemerintah tersebut agar dapat terealisasikan perlu adanya peranan oleh lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau Badan Usaha Swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi, dan pengembangan usaha mikro.

Pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut perlu diiringi dengan kontribusi lembaga pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM. Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota di Bidang Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro termasuk tugas dari Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM, yaitu dengan melakukan pendampingan dan penguatan terhadap pelaku UMKM agar dapat menjalankan usahanya dengan baik. Pendampingan yang diberikan dapat berupa advokasi terkait usaha yang dijalankan, konsultasi pendanaan, sarana, dan prasarana, informasi usaha, kemudahan perizinan usaha dan perusahaan promosi dagang dan dukungan kelembagaan.³

UMKM secara khusus di Kota Parepare diberikan pendampingan dan pemberdayaan oleh Dinas Tenaga Kerja khususnya Bidang Koperasi dan UMKM. Salah satu lokasi UMKM yang didampingi dan diberdayakan oleh Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM yaitu Pusat Kuliner Cempae. Lokasi ini sebelum dilakukan pendampingan dan pemberdayaan oleh pemerintah merupakan tempat yang kumuh dan UMKM yang berada disana tidak terkelola dengan baik dan professional. Berangkat dari hal tersebut akhirnya pemerintah melakukan revitalisasi dan menata lokasi tersebut menjadi Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

³ Peraturan walikota Parepare nomor 13 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan, organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja dinas tenaga kerja.

Lingkungan yang kumuh berpengaruh terhadap tingkat pendapatan rendah masyarakat dan menggambarkan sebuah kemiskinan. lingkungan kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan perlu adanya solusi yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan menaikkan pendapatan di daerah tersebut.⁴ Pemukiman kumuh merupakan kondisi lingkungan yang tidak baik bagi masyarakat. Ketika masyarakat hidup di kondisi lingkungan yang kumuh dan tidak berkualitas tentu akan berpengaruh pada kondisi sosial ekonominya. Kehidupan setiap masyarakat berbeda-beda bergantung pada latar belakang dan lingkungan hidupnya, hal tersebut pulalah yang membedakan kondisi hidup masyarakat lingkungan kumuh dengan masyarakat dengan lingkungan yang baik.

Di Kota Parepare secara khusus tempat yang saat ini menjadi Pusat Kuliner Cempae merupakan tempat yang sangat kumuh sebelum direvitalisasi oleh pemerintah. Akibat lingkungan yang kumuh tersebut membuat masyarakat lain tidak berminat untuk berkunjung ke tempat tersebut, sehingga pelaku UMKM yang ada disana memiliki pendapatan yang sangat rendah. Agar dapat mencapai amanat konstitusi Negara Indonesia yakni kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya di daerah Pusat Kuliner Cempae maka pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan dan bantuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan kumuh dan menyejahterakan masyarakat yang ada di daerah tersebut agar tidak lagi mengalami permasalahan pendapatan rendah. Kebijakan dan solusi yang dikeluarkan pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM yakni dengan menata tempat tersebut dan membuat tempat wisata yakni Anjungan Cempae yang menjadi icon dan daya tarik tempat tersebut agar banyak pengunjung. Dengan pengembangan

⁴ Jurnal litbang Sukowati Vol. 5 No 1 November 2021 judul kemiskinan dan lingkungan : perpektif kemiskinan perkotaan dan pedesaan

pengelolaan tempat tersebut, kini tidak lagi menjadi tempat kumuh justru menjadi tempat wisata yang menjadi pilihan kunjungan saat orang-orang berada atau berkunjung di Kota Parepare. Hal inilah yang kemudian memberikan Dampak kepada masyarakat di daerah tersebut, akibatnya peluang dan profit usaha yang mereka jalankan menjadi meningkat, karena selain pemerintah membuat icon yang menjadi daya tarik pemerintah juga memberikan fasilitas kepada masyarakat tersebut untuk menjalankan usahanya.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM yaitu dengan menata UMKM yang ada di daerah tersebut sebagai instrumen untuk menaikkan daya beli masyarakat. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, perbaikan UMKM merupakan langkah yang sangat efektif untuk peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dalam pengembangan UMKM langkah ini tidak semata-mata hanya menjadi langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bagi pihak UMKM yang dikembangkan, dapat beriringan dengan pemerintah. Karena potensi usaha mereka memiliki peluang kreatifitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare.

Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae. Kegiatan yang ada pada dinas yang penulis teliti adalah salah satu kegiatan yang berada pada Bidang Koperasi dan UMKM. Yang dimana didalamnya terdapat kegiatan pembinaan, pengembangan dan kelembagaan sehingga dari kegiatan tersebut

dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat di daerah Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang; **Peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi Dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi Dan UMKM Kota Parepare dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi Dan UMKM Kota Parepare dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare?
3. Apa solusi yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah diatas, maka dapat ditemukan tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi Dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.
3. Mengetahui solusi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini menjadi penambah kepustakaan dibidang Ekonomi Syariah dan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang Ekonomi Syariah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengelolaan UMKM khususnya Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare. dan mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Penelitian ini juga diharapkan menjadi informasi yang penting dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kekurangan dan kelebihan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Rani Yanti, program Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020 dengan judul skripsi “Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UMKM dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Jambi“. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal pada kelompok usaha maka dari itu, masalah yang di angkat penulis dalam pengembangan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM terhadap para pengusaha di Kota Jambi adalah terdapat pada proses berjalannya pengembangan kepada masyarakat yang dilakukan.⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan yang penulis akan teliti berada pada metode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan metode

⁵ Rani Yanti, skripsi, “peran dinas tenaga kerja, koperasi dan UMKM dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Jambi , (skripsi sarjana, program studi ekonomi syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam, universitas islam negeri sulthan thaha saifuddin jambi, 2020),h.10.

penelitian kualitatif, dengan objek yang dituju adalah pelaku usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare dan pegawai bidang koperasi dan UMKM Kota Parepare. Adapun perbedaaan penelitian tersebut dengan yang penulis akan teliti yaitu terletak pada fokus penelitian. Penelitian diatas menjelaskan tentang pengembangan UMKM secara umum yang berada di Kecamatan Telainipura Kota Jambi, sedangkan penulis menjelaskan tentang peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dalam perkembangan UMKM secara khusus di Pusat Kuliner Cempae.

Sofiy Hasbiyyah, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2018 dengan judul skripsi “Strategi pengembangan UMKM pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Banyumas” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM (Dinnakerkop UKM) Kabupaten Banyumas dan memberikan alternatif yang tepat bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Banyumas.⁶

Persamaan pada penelitian tersebut dengan yang penulis akan teliti berada pada metode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan membahas terkait perkembangan UMKM. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu terletak pada substansi penelitian. Penelitian diatas menjelaskan tentang strategi dalam perkembangan UMKM, sedangkan penulis menjelaskan tentang peranan Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan pusat kuliner Cempae Kota Parepare.

⁶ Sofiy Hasbiyyah, skripsi, “strategi pengembangan UMKM pada dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas” skripsi sarjana, jurusan ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam institut agama islam negeri (IAIN) Purwokerto, 2018) h.8.

Nurul Annisa Mukhtar, jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2021 dengan judul skripsi, “strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis ekonomi kreatif bidang kuliner di Kota Palopo“ penelitian ini bertujuan 1. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ekonomi kreatif bidang kuliner dalam mengembangkan usahanya untuk mengetahui Strategi yang harus dilakukan untuk pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif bidang kuliner di Kota Palopo dengan menggunakan analisis SWOT.⁷

Pada metode penelitian yakni penelitian kualitatif dan pada pembahasan mengenai pengembangan UMKM. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis akan teliti yaitu terletak pada fokus penelitian , dimana penelitian tersebut memiliki fokus pembahasan mengenai strategi pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kota Palopo secara khusus sementara yang penulis akan teliti adalah pengembangan pengelolaan pusat kuliner Cempae Kota Parepare.

Rahmadayanti S, program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar 2021 dengan judul skripsi “Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton“.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti berada Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Lasalimu Kabupaten Buton dan

⁷ Nurul annisa mukhtar, skripsi “strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis ekonomi kreatif bidang kuliner di kot palopo“ skripsi sarjana jurusan ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri parepare h.6

pengembangan seperti apa yang dilakukan dinas terkait terhadap UMKM di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis akan teliti berada pada metode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan objek yang dituju yaitu terkait dengan UMKM. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis akan teliti yaitu terletak pada titik fokus penelitian, dimana penelitian di atas meneliti Usaha Kecil Menengah secara menyeluruh di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, sedangkan penulis menjelaskan tentang bagian dari UMKM secara khusus pada pengembangan pengelolaan usaha yang berada pada Pusat Kuliner Cempae Parepare.

Dinda Murah Ati, program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021 dengan judul skripsi “Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Embong Ijuk sebelum dan sesudah menerima modal KUR BSI unit Kepahiang.”⁹

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada persamaan penelitian yang membahas terkait usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu terletak penelitian yang akan penulis teliti secara khusus meneliti pengembangan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Cempae Kota Parepare sedangkan penelitian tersebut meneliti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait penerimaan KUR di bank BSI unit Kepahiang.

⁸ Rahmadayanti S, skripsi “peran dinas koperasi dan UKM dalam pengembangan UMKM di kecamatan Lasalimu kabupaten Buton” skripsi sarjana jurusan ilmu administrasi Negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Bosowa Makassar.h.10

⁹ Dinda Murah Ati, skripsi “perkembangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Desa Embong Ijuk sebelum dan sesudah menerima KUR BSI unit Kepahiang.

Tabel 2.1 Bagan Penelitian Relevan

Nama	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
Rani Yanti	Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM) Kota Jambi	Persamaan penelitian ini dengan yang penulis akan teliti yaitu berada pada metode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan objek yang dituju adalah pelaku usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare dan pegawai Dinas tenaga kerja bidang koperasi dan UMKM.	Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis akan teliti yaitu terletak pada fokus penelitian. penelitian diatas menjelaskan tentang Pengembangan UMKM secara umum yang berada di Kecamatan Telanipura Kota Jambi sedangkan penulis menjelaskan tentang peran dinas tenaga kerja bidang koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan UMKM secara khusus di Pusat Kuliner Cempae.
Sofiy Hasbiyyah	Strategi pengembangan UMKM pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Banyumas	Kesamaan terletak pada metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif dan membahas terkait dengan pengembangan UMKM.	Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis akan teliti terletak pada substansi penelitian, penelitian tersebut membahas terkait strategi dalam pengembangan UMKM sedangkan yang penulis akan

			teliti yaitu peranan dinas tenaga kerja bidang koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan pusat kuliner Cempae Kota Parepare.
Nurul Annisa Mukhtar	Strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah berbasis ekonomi kreatif di bidang kuliner di Kota Palopo	Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan pembahasan mengenai UMKM.	Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis akan teliti berada pada inti pembahasan dimana penelitian tersebut secara spesifik membahas mengenai strategi pengembangan UMKM sedangkan penulis membahas tentang peran pemerintah dalam pengembangan pengelolaan UMKM..
Rahmadayanti.S	Peran dinas koperasi dan UKM dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton	Persamaan penelitian tersebut dengan yang penulis akan teliti terletak pada metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dengan objek yang dituju terkait dengan UMKM.	Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis akan teliti yaitu penelitian tersebut meneliti UMKM yang berada di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton secara menyeluruh sedangkan penulis meneliti bagian dari UMKM secara

			husus tepatnya berada pada Pusat Kuliner Cempae.
Dinda Murah Ati	Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Desa Embung Ijuk sebelum sesudah menerima modal KUR BSI UNIT Kepahiang.	Persamaan penelitian terdapat pada pembahasan mengenai UMKM.	Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis akan teliti yaitu penelitian tersebut membahas keterkaitan antara UMKM dengan sesudah maupun sebelum menerima KUR BSI di Kepahiang.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi acuan teori dalam menganalisis dan menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Adapun tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dijalankan oleh perorangan namun dalam skala kecil namun memiliki dampak perekonomian yang menjanjikan baik bagi pelaku usaha, lingkungan usahanya, maupun Negara. Hal ini dikarenakan apabila UMKM memiliki perkembangan selain memberikan kesejahteraan bagi pemilik usaha juga dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan di suatu daerah. Dalam pengembangan UMKM perlu melakukan pengelolaan secara massif dan efektif agar usaha yang dijalankan dapat dikatakan berhasil.

a. Pengertian UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha disektor ekonomi. Pada prinsipnya pembeda antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan alat ukur ini berbeda menurut setiap Negara.¹⁰

Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan kategori bisnis dalam skala kecil yang mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, terutama saat krisis ekonomi yang terjadi pada periode 1998 sampai periode 2000an. UMKM dianggap dapat bertahan ditengah krisis ekonomi berlangsung disaat puluhan perusahaan besar mengalami kebangkrutan. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki pengertian yang berbeda-beda disetiap literatur menurut beberapa instansi atau kelembagaan bahkan undang-undang. Definisi UMKM menurut amanat konstitusi dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM adalah:

- a) Usaha mikro adalah produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang ini.
- b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

¹⁰ Tambunan, tulus, usaha mikro kecil dan menengah Indonesia: isu-isu penting : LP3ES, 2012.

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau perusahaan cabang, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹¹

Pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi masyarakat dalam lingkup kecil dengan bidang usaha dominan merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak sehat. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Nasional. Usaha mikro memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, dapat menanggulangi kemiskinan, serta berperan dalam penyediaan barang dan jasa yang dapat meringankan beban para pelaku usaha kecil menengah.

b. Peranan dan kontribusi UMKM

UMKM memiliki peranan penting terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak hanya berlaku hanya pada Negara maju tetapi juga berlaku pada Negara berkembang. Di Negara berkembang memiliki peran dan karakteristik yang berbeda dengan usaha besar, antara lain sebagai berikut :

¹¹ Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM.

- a. Jumlah perusahaan sangat banyak melebihi jumlah usaha besar. Terutama dari kategori usaha mikro, dan usaha kecil menengah berbeda dengan usaha besar dan terbesar di seluruh pelosok pedesaan, termasuk wilayah-wilayah yang terisolasi. Oleh karena itu, kelompok usaha ini mempunyai signifikansi lokal yang khusus untuk ekonomi pedesaan. Dalam kata lain kemajuan pembangunan UMKM. Karena padat karya, berarti mempunyai potensi dan peluang yang sangat besar. Pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai elemen penting dalam kebijakan nasional untuk menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin. Hal ini juga dapat menjelaskan mengapa UMKM sangat penting di daerah pedesaan, terutama daerah yang sektor pertanian mengalami stagnasi atau sudah tidak mampu lagi menyerap pertumbuhan tawanan dan tahunan dari penawaran tenaga kerja di pedesaan. Sesuai teori yang dikemukakan oleh A. Lewis (suplai tenaga kerja tak terbatas), kondisi kelebihan tenaga kerja di pedesaan akan menciptakan arus manusia terus menerus dari pedesaan ke perkotaan. Apabila kegiatan ekonomi perkotaan tidak mampu menyerap para pendatang tersebut, jumlah pengangguran akan meningkat, dan akan muncul banyak masalah sosial di perkotaan. Karena kegiatan-kegiatan non pertanian di pedesaan, terutama industry, selalu diharapkan berfungsi dapat membatasi arus migrasi ke perkotaan, dan dalam hal ini UMKM di pedesaan dapat memainkan peran yang krusial
- b. Walau pada umumnya masyarakat pedesaan miskin, banyak bukti menunjukkan bahwa mereka bisa menabung, dan bersedia mengambil resiko dengan melakukan investasi. Dalam hal ini UMKM bisa menjadikan titik awal bagi mobilisasi tabungan/investasi di pedesaan sementara, pada waktu yang sama,

kelompok usaha ini dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan kemampuan berwirausaha dari orang-orang desa.¹²

- c. Terbukti pada umumnya pengusaha-pengusaha UMKM membiayai sebagian besar oprasional bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditamba dengan bantuan atau pinjaman dari saudara, krabat, pemberi kredit informal, pedagang atau pengepul, para pemasok bahan baku, dan pembayaran dimuka dari para konsumen. Karena itu, kelompok usaha ini dapat memainkan peran penting lainnya, yaitu sebagai alat mengalokasikan tabungan-tabungan pedesaan untuk kegiatan- kegiatan yang produktif.
- d. Barang yang diproduksi oleh UMKM banyak tetapi juga untuk masyarakat kelas menengah dan atas, terbukti secara umum pasar utama bagi UMKM adalah barang-barang konsumsi yang bersifat sederhana dengan harga murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, meubel dari kayu, bambu dan rotan, barang-barang lainnya dari kayu, alas kaki, dan alat-alat dapur dari aluminium dan plastik. Barang-barang ini memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
- e. Saat ekonomi Indonesia dilanda krisis besar tahun 1997/1998 banyak UMKM yang mampu bertahan dibandingkan usaha yang berskala besar. Karena itu, kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis pengebangan usaha lebih besar. Misalnya usaha Mikro menjadi landasan bagi usaha Kecil, sedangkan Usaha Kecil sebagai landasan usaha Menengah dan usaha menengah sebagai landasan usaha besar.¹³

¹² Tambunan, 2012:2 Usaha Kecil Dan Menengah, Jakarta LP3ES, Jakarta

¹³ Tambunan, 2012:2 Usaha Kecil Dan Menengah, Jakarta LP3ES, Jakarta

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM pada PDB juga mencapai 60,5% dan pada permasalahan penyerapan tenaga kerja UMKM menyumbang 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.¹⁴ Keberadaan UMKM mampu menyelesaikan permasalahan perekonomian yang terjadi. Sehingga hal tersebut menjadi alasan penting mengapa UMKM perlu diperhatikan dan dikembangkan. Dengan mengembangkan UMKM maka akan membantu menyelesaikan permasalahan lainnya akibat kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

c. Kriteria UMKM

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha kerakyatan yang diatur dalam pasal 6 UU NO 20 tahun 2008. Maka kriteria UMKM berdasarkan permodalan UMKM dibedakan masing-masing meliputi:

a) Usaha mikro

Usaha mikro sebagai usaha produktif baik yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang sesuai dengan kriteria usaha mikro, yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000 dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil usaha tiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000

b) Usaha kecil

Usaha ini merupakan usaha yang berdiri sendiri baik perorangan maupun kelompok dan bukan badan usaha. Usaha kecil memiliki kriteria, yaitu usaha

¹⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia siaran pers HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia siaran pers HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022

yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000 dengan maksimal yang dibutuhkannya Rp 500.000.000 hasil penjualan setiap tahunnya Rp 300.000.000 – 2.500.000.000

c) Usaha menengah

Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang dari perusahaan pusat. Usaha ini dikategorikan bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 -10.000.000¹⁵

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, beberapa instansi atau lembaga pemerintahan contohnya seperti departemen perindustrian dan badan pusat statistic (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai 99 orang. Perusahaan dengan jumlah pekerja diatas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.¹⁶

d. Klasifikasi UMKM

Berdasarkan pandangan dari segi perkembangannya, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok usaha UMKM merupakan usaha yang sangat kontributif dan memiliki kekuatan terhadap kemajuan ekonomi. Sehingga dengan memaksimalkan pengelolaan UMKM maka akan berdampak baik pula terhadap kemajuan ekonomi. Adapun klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu:

¹⁵ Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan UMKM di Indonesia“, jurnal ilmiah Cano Ekonomos , Vol 6 No. 1. (Januari 2017), hlm 55

¹⁶ Tri Siwi Agustina, Kewirausahaan Teori Dan Penerapan Wirausahaan Dan UMKM Di Indonesia “ (Jakarta; Mitra Wacana Media,2015), hlm 5

- a) livelihood activities, merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mendapatkan penghasilan dan membiayai hidup, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b) Micro Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c) Small Dynamics Enterprise, merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontak dan ekspor.
- d) Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).¹⁷

e. Ciri-ciri UMKM

UMKM tidak hanya berbeda dari aspek modal, omset, dan jumlah tenaga kerja, perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Ciri-ciri usaha mikro, yaitu :

- a) Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
- b) Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- c) Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.

¹⁷ M. Azrul Tanjung, Koperasi Dan Umkm Sebagai Pondasi Perekonomian Indonesia (Pt. Glora Aksara Pratama, 2017) Hlm 23

- d) Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- e) tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki umumnya kurang dari 4 orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.
- f) perputaran usaha umumnya cepat, mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karna biaya manajemennya relative rendah.
- g) pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan.¹⁸

Ciri-ciri usaha kecil, yaitu:

1. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan. Walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
2. SDMnya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA sudah memiliki pengalaman usaha.
3. pada umumnya sudah memiliki persyaratan usaha atau legalitas lainnya termasuk NPWP.
4. sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi perencanaan, studi kelayakan , dan proposal kredit terhadap bank masih sangat memerlukan jasa pendamping.
5. tingkat pendidikan relative sangat rendah.
6. belum memiliki akses ke perbankan tetapi sebagian sudah memiliki akses non bank

¹⁸ M. Azrul Tanjung, Koperasi Dan Umkm Sebagai Pondasi Perekonomian Indonesia (Pt. Glora Aksara Pratama, 2017) Hlm 23

7. tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas.

Ciri-ciri usaha menengah, yaitu:

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran dan produksi
2. Tidak melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan , termasuk yang dilakukan oleh bank.
3. Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan.
4. sudah memiliki segala persyaratan legalitas.¹⁹

f. Karakteristik UMKM

Usaha kecil di Indonesia sangatlah potensial untuk dapat berkembang dengan baik hal ini dikarenakan Indonesia memiliki pasar yang sangat luas, bahan baku yang mudah dijangkau, serta sumber daya manusia yang besar merupakan faktor pendukung perkembangan dari usaha tersebut, tetapi masih perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti : perkembangan usaha yang harus disertakan dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik karena dengan hal tersebut maka akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem-sistem produksi yang efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan

¹⁹ M. Azrul Tanjung, koperasi dan UMKM sebagai pondasi perekonomian Indonesia, PT Glora Aksara Pratama, 2017 hlm 92-93

pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola suatu usaha, secara umum sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan administrasi yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan tidak dilakukan pembaharuan sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat pesaing yang sangat tinggi
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisien jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta disverivikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasal modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.²⁰

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha UMKM menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang berpeluang menimbulkan masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

²⁰ Pandji Anoraga, koperasi, kewirausahaan, dan usaha kecil , cet. Ke - 1 , Jakarta : Rineka Cipta, 2002

g. Kekuatan dan kelemahan UMKM

UMKM memiliki kelebihan yang merupakan kekuatan potensial agar menjadi basis pengembangan dimasa yang akan datang, yaitu :

1. Penyediaan lapangan industry kecil dalam tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan mampu menyerap hingga 50% tenaga kerja yang tersedia.
2. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
3. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melakukan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
4. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industry sebagian besar memanfaatkan limbah dari industri besar atau industri lainnya.
5. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilakukan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.²¹

Kelemahan, seringkali menjadi faktor penghambat dan menimbulkan permasalahan dari UMKM. Permasalahan tersebut terbagi menjadi dua faktor

1. Faktor internal
 - a. Masih terbatasnya sumber daya manusia
 - b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri lebih kecil memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
 - c. Kecendrungan konsumen yang belum mencapai mutu produk industri kecil

²¹ M. Azrul Tanjung, Koperasi Dan Umkm Sebagai Pondasi Perekonomian Indonesia, PT Glora Aksara Pratama, 2017 Hlm 27

- d. Kendala permodalan usaha sebagian besar industri memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relative lebih kecil.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembangan dan pembinaan UMKM. Misalnya, solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya pengawalan, dan program yang terbilang tumpang tindih.

Dari kedua faktor diatas menimbulkan kesenjangan antara faktor internal dan faktor eksternal, yaitu disisi Perbankan, BUMN dan lembaga pendamping. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan.

1. Asas dan tujuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menyebutkan bahwa usahamikro, kecil, dan menengah berasaskan²² :

- a. Kekeluargaan
- b. Demokrasi ekonomi
- c. Kebersamaan
- d. Efisiensi berkeadilan
- e. Berkelanjutan
- f. Berwawasan lingkungan
- g. Kemandirian
- h. Keseimbangan kemajuan; dan

²² Rio F. Wilantara Dan Sulistiawati, Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016, Hlm 9

i. Kesatuan ekonomi nasional

Adapun tujuan usaha mikro, kecil dan menengah ialah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.²³

2. Aspek Pendanaan dan Pembiayaan UMKM

A. Aspek Pendanaan

Berdasarkan pasal 8 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, aspek pendanaan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a ditunjukkan untuk :

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat di akses oleh UMKM.
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- d. Membantu para pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan jasa atau produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.²⁴

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 2 dan 3

²⁴ UU No. 20 Tahun 2008 pasal 7 ayat (1) tentang UMKM

b. Aspek Pembiayaan

Sesuai dengan Amanat Konstitusi pasal 21 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, aspek pembiayaan UMKM diatur:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil
2. Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
3. Usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro Dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
4. Pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat memberikan Hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lainnya yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan, persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil.²⁵

2. Peranan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)²⁶, peranan adalah tindakan bersifat dinamis atau berubah-ubah dari kedudukan jika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia seseorang yang menjalankan suatu peranan. Peranan lebih menunjukkan kepada fungsi, penyesuaian

²⁵ UU No. 20 tahun 2008 pasal 21 tentang UMKM

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

diri, dan sebagai proses. Sederhananya peran adalah seseorang yang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat dengan menjalankan suatu peranan.

Peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Hakikatnya peranan adalah perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organisasi.²⁷

Peran merupakan perilaku individu atau sebuah kelompok tertentu, sesuai pada suatu peristiwa dan kondisi tertentu. Perilaku yang dilakukan oleh individu atau sebuah kelompok tersebut merupakan suatu tindakan yang memang ingin dilakukan oleh individu atau kelompok yang berkedudukan tersebut yang berkedudukan atau memiliki jabatan pada tatanan masyarakat. Sehingga, tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok memiliki kewajiban untuk dilakukan dengan penuh tanggung jawab pada suatu keadaan.

Terdapat 5 aspek penting dalam peran, yaitu:

1. Peran bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran berkaitan dengan perilaku kinerja, yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran sulit diartikan
4. Peran dapat dipelajari dengan cepat dan tepat dan dapat menghasilkan perubahan beberapa perilaku utama.

²⁷ Rahmadayanti S, skripsi “peran dinas koperasi dan ukm kabupaten buton dalam pengembangan sector usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) di kecamatan Lasalimu

5. Peran dan pekerjaan tidaklah sama, seseorang yang melakukan suatu pekerjaan bisa memainkan beberapa peran.²⁸

Peran pemerintah dalam sebuah aspek sangatlah penting , tak terkecuali dengan aspek ekonomi secara khusus pada sektor UMKM, adapun peran pemerintah yaitu:

1. Peran pemerintah

Ada tiga fungsi hakiki pemerintah, yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development) dengan tujuan masing-masing. Pelayanan akan membuahkan keadilan, pemberdayaan akan mendorong kemandirian, dan pembangunan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.²⁹ Untuk menjalankan perannya pemerintah harus memberikan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh tanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban peranannya. Ada dua macam fungsi pemerintah yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer adalah fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak-pihak yang diperintah. Arti dari fungsi primer ini yaitu tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik, dan sosial masyarakat karena semakin meningkat kondisi yang diperintah, maka semakin meningkat fungsi primer pemerintah. fungsi pelayanan ini bersifat menyeluruh, diterapkan dan dilakukan oleh seluruh Negara baik Negara maju maupun Negara berkembang sesuai dengan kondisi masing-masing. berikutnya yaitu

²⁸ Kanfer 1987:197 Task-specific motivation: An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, and determinants. *Journal of Social and Clinical Psychology*.

²⁹ Ndraha talidzuhu, 2008, kibernologi dan kepomongprajaan, banten sirao credantia center, h.174.

fungsi sekunder, fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial masyarakat yang diperintah. Arti dari fungsi pemerintah sekunder yaitu semakin tinggi taraf hidup maka semakin bargaining position dan semakin integratif masyarakat yang diperintah serta semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Jika kondisi ekonomi masyarakat tidak kuat maka pemerintah melakukan pembangunan. Semakin berhasil pembangunan, semakin meningkat kondisi ekonomi masyarakat, semakin berkurang fungsi pemerintah dalam hal pembangunan. Semakin berhasil pembangunan, semakin meningkat kondisi ekonomi masyarakat, semakin berkurang fungsi pemerintah dalam hal pembangunan.

Menurut Siagian ada 5 fungsi pemerintah, yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksanaan sendiri³⁰, berikut penjelasannya:

1. Pemerintah sebagai stabilisator

Salah satu ciri dari suatu Negara yang sedang membangun adalah labilnya situasi dan keadaan politik, ekonomi, sosial serta pertahanan keamanannya. Dengan demikian adanya pemerintah sebagai pemeran dalam menjaga stabilitas terhadap kondisi masyarakat yang serba berubah-ubah dan cenderung tidak kokoh.

2. Pemerintah sebagai inovator

Inovasi lahir menjadi temuan baru, cara baru, system baru, serta cara berfikir baru. Sebagai actor utama, dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah perlu menjadi pusat inovasi tersebut.

³⁰ Siagian, Sondang P. 2003. Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, Dan Strateginya). Jakarta : Bumi Aksara

3. Pemerintah sebagai modernisator

Setiap Negara perlu melakukan upaya agar negaranya dapat mengikuti perkembangan jaman yang menuntut penguasaan teknologi baru, konsep berfikir baru, atau menjadi Negara yang modern atau kekinian.

4. Pemerintah sebagai pelopor

Pemerintah harus menjadi pelopor atau penggerak dari berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjadi panutan bagi seluruh masyarakatnya. Menjadi role model bagi masyarakatnya untuk melakukan hal-hal positif yang baik untuk ditiru bagi masyarakatnya dan berdampak baik pada kelancaran pembangunan nasional.

5. Pemerintah sebagai pelaksana sendiri

Pembangunan seyogianya memang bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga menjadi tanggung jawab nasional. Namun dalam berbagai aspek, pemerintah dituntut dan diharapkan melakukan fungsi pelaksanaan sendiri, terutama pada bidang dimana masyarakat tidak mau melakukannya karena tidak akan menguntungkan meski sedikit, contohnya penanggulangan bagi orang miskin dan terlantar.³¹

Dalam menjalankan perannya, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dari peran pemerintah, diantaranya adalah:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana merupakan modal utama bagi pemerintah untuk merealisasikan suatu rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan besar.

³¹ Siagian, Sondang P. 2003. Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, Dan Strateginya). Jakarta : Bumi Aksara

Sarana dan prasarana yang terpenuhi dapat memudahkan pemerintah untuk merealisasikan program yang telah dirancang. Oleh karena itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk merawat, memperbaharui, dan menggendakan sarana dan prasarana demi berlangsungnya peran pemerintah yang maksimal.

2. Ketersediaan anggaran

Tersedianya anggaran merupakan hal yang sangat krusial bagi pemerintah untuk mengoptimalkan perannya. Dari lingkup pemerintah baik pada tataran pusat maupun daerah aspek finansial merupakan aspek yang sangat diperlukan untuk menjalankan perannya selaku pelayan masyarakat. Finansial merupakan suatu rencana keuangan yang mencatat pengeluaran serta penerimaan tentang periode waktu tertentu. Anggaran menjadi penting karena sumber finansial pemerintah berasal dari pemerintah juga merupakan alat yang dapat menjadi motivasi pegawai, sarana pengembangan standar ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi, serta alat yang berfungsi sebagai kordinator seluruh unit kerja dalam aktivitasnya pada pemerintahan.

3. Kemitraan

Prinsip Good Governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan value for money, merupakan suatu prinsip yang mendasari pola hubungan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pola hubungan ketiga pihak ini merupakan suatu bentuk kemitraan atau kerjasama agar dapat terjalin dengan baik dan harmonis sehingga tercipta suasana pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan istilah good governance.

4. Partisipasi dari masyarakat

Keterlibatan masyarakat merupakan fokus utama, karena masyarakat berada pada posisi yang sangat penting, berada pada posisi subyek dan obyek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan karena merupakan faktor yang dapat membantu mengoptimalkan peran dan kewajiban pemerintah karena masyarakat sebagai subyek dan obyek kebijakan ikut serta membantu pemerintah dalam mengaktualisasikan kebijakan tersebut.³²

Pengembangan ekonomi nasional tidak terlepas dari peranan UMKM. Sektor UMKM sangat berkontribusi baik dalam penyediaan lapangan pekerjaan karena membantu mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu peran pemerintah pusat maupun daerah sangatlah penting dalam pengembangan UMKM agar menjadikan UMKM sebagai tonggak bagi perekonomian pusat nasional maupun daerah.

Peran pemerintah yang efektif dalam hal pengembangan, UMKM yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah perlu menyiapkan fasilitas sebagai aspek pendukung agar UMKM dapat mencapai target yang ditempuh agar UMKM dapat mencapai target yang dituju. Pemerintah dapat menyiapkan fasilitas berupa pelatihan, pemberian bantuan, atau berupa subsidi barang maupun jasa, berupa keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.

2. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai

³² Ir. Sri Hariyani, Pentingnya Partipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan, 2017.

regulator pemerintah memiliki fungsi menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan mengenai aturan persaingan usaha. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam fungsi regulator ini, pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu, wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintahan daerah. Keduanya memiliki wewenangnya sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerahnya masing- masing.³³

3. Peran pemerintah sebagai katalisator

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari katalisator adalah yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. agar dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah pun memiliki peranan untuk mempercepat proses perkembangan UMKM. Keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak bisa dilakukan secara universal. Keterlibatan pemerintah dalam perkembangan UMKM tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, tetapi hanya sebagai faktor memmpercepat saja, pemerintah dapat melakukan beragam cara misalnya pemberian penghargaan terhadap UMKM, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, permodalan termasuk modal ventura atau modal ventura atau modal bergulir dan prasarana intelektual bagi UMKM.³⁴

³³ Tanggaran Gani Putra, "Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-manik Kaca di Kabupaten Jombang", Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol.3, No.1, 2015, hlm.4

³⁴ Gede diva, 2009;15 Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah. Bakrie School of Management.

Menurut Harahap, peran pemerintah merupakan usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan klasik dalam dunia usaha terutama yang terjadi pada UMKM, diantaranya:

a. Masalah pada teknologi

Sebagian besar masalah UMKM terletak pada faktor produksi yang berkaitan dengan teknologi karena faktor produksi yang berupa teknologi saat ini membutuhkan alokasi sumberdaya yang cukup tinggi menurut UMKM. Pada saat teknologi semakin canggih dan kebutuhan spesifikasi produk masyarakat yang semakin kompleks, maka semakin terdesaknya UMKM karena keberlangsungan UMKM merupakan keharusan dalam penggunaan teknologi.

b. Masalah pada modal

Pada UMKM masalah modal sudah dianggap masalah yang sering kali terjadi dan menjadi perbincangan pada suatu konferensi. Tak jarang suatu modal UMKM yang awalnya berasal dari kepemilikan pribadi masih kurang dari segi permodalannya.

c. Masalah pada akses pasar

Permasalahan yang paling umum terjadi bagi UMKM yaitu pada akses pasar. UMKM yang baru berdiri biasanya kesulitan untuk mendapatkan pasar karena persaingan yang begitu ketat dan dalam segi pengelolaan usahanya. UMKM yang baru berdiri merupakan usaha awal yang belum tergolong kuat dari segi pengelolaan usahanya.³⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, pemerintah daerah memiliki urusan wajib yang harus

³⁵ Harahap, 2014;14. Analisis kritis atas laporan keuangan. Jakarta : Rajawali Pers

diselenggarakan. Ada 26 urusan wajib bagi pemerintah daerah, salah satunya adalah harus diselenggarakannya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian, pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah, dijelaskan bahwa penanganan urusan wajib seperti koperasi dan usaha kecil menengah, hendaknya dikelola oleh sebuah satuan direktif yang berbentuk dinas.

Sehingga, kesimpulan dari peran pemerintah adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjalankan perannya sebagai pelayan public dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hubungan peran pemerintah dengan penelitian ini yaitu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah sebagai upaya dalam mengembangkan UMKM. Untuk dapat memecahkan permasalahan pada UMKM maka peran pemerintah sangat dibutuhkan agar dapat mengatasi masalah pada teknologi, modal, dan akses pasar. Secara khusus peran pemerintah terkait penelitian ini, yaitu pemerintah dalam hal ini dinas tenaga kerja bidang koperasi dan UMKM Kota Parepare berperan mengatasi masalah pada modal pelaku usaha di Pusat Kuliner Cempae. Modal yang diberikan berupa bantuan revitalisasi bangunan terhadap tempat berusaha serta membangun tempat wisata yang mejadi daya tarik bagi para pengunjung agar dapat memberikan profit bagi para pelaku usaha di pusat kuliner Cempae Kota Parepare.

2. Peranan Pelaku Usaha

Peran pelaku usaha dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi pelaku usaha terhadap peran yang dijalankan pemerintah. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan

potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

³⁶Mubyarto mengartikan bahwa partisipasi sebagai bentuk kesediaan turut membantu keberhasilan dari program yang sesuai dengan kemampuan seluruh anggota masyarakat dengan tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.³⁷ Partisipasi adalah tindakan dasar kerjasama yang membutuhkan waktu dan usaha untuk membangun dan berfungsi dengan baik, hanya bergerak maju bila ada kepercayaan. FAO dalam Britha mengungkapkan pandangannya tentang partisipasi. Melalui berbagai macam kajian, buku pedoman, dokumen proyek serta telah merangkum dan mengungkapkan pendapatnya bahwa partisipasi memiliki makna sebagai berikut :

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- c. Partisipasi adalah ‘pemekaan’ (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan
- d. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka

³⁶ Adi, 2008;27 .Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

³⁷ Mubyarto, 1997:35. Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan, Kajian Bersama Pengembangan Kebijakan, Yogyakarta : Aditya Media

- e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak- dampak sosial.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.³⁸

Dalam hubungannya pada pembangunan, partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat pada proses pembangunan yang terbagi dalam 2 bentuk, yaitu :

1. Keterlibatan pada kegiatan pembangunan

Proses pembangunan dilakukan dengan cara menentukan program-program yang berorientasi pada tujuan besar. Kemudian pada program-program tersebut dibentuk kegiatan-kegiatan guna merealisasikan program yang ada. Keterlibatan masyarakat pada proses pembangunan dengan ikut berpartisipasi pada kegiatan pembangunan dapat membantu terealisasinya tujuan besar dari kegiatan tersebut.

2. Keterlibatan pada pemanfaatan hasil pembangunan

Selain berpartisipasi dengan bentuk sumbangan tenaga, waktu, dan pikiran, partisipas juga dapat dilakukan dengan ikut memanfaatkan hasil dari pembangunan, karena pemerintah melakukan keseluruhan proses pembangunan ini adalah ditujukan untuk masyarakat, sehingga ketika masyarakat memanfaatkan hasil dari pembangunan tersebut, dapat dikatakan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah ini sudah berhasil.³⁹

³⁸ Britha,1999;64. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

³⁹ Slamet, 2003;8 . Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Membetuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan terkait dengan pengertian partisipasi adalah bentuk keikutsertaan atau keterlibatan seseorang didalam sebuah perkumpulan atau kelompok yang ikut pada suatu kegiatan dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan. Hubungan antara partisipasi dengan penelitian ini, yaitu keterleabatan para pelaku usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare. bentuk partisipasinya berupa:

1. Partisipasi dalam perencanaan, dalam penelitian ini pelaku usaha berpartisipasi dalam perencanaan karena turut memberikan fakta yang terjadi di lapangan dan membantu memberikan saran.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, dalam penelitian ini pelaku usaha berpartisipasi dalam pelaksanaan karena pelaku usaha merupakan pihak yang menjalankan dan mendapatkan hasil dari perencanaan dan tindakan pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dalam penelitian ini pelaku usaha berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil karena pelaku usaha sebagai pihak yang mendapatkan dampak dan maanfaat dari perencanaan dan pelaksanaan.
4. Partisipasi dalam evaluasi, dalam penelitian ini pelaku usaha berpartisipasi dalam evaluasi karena pelaku usaha memberikan keterangan kondisi yang terjadi dilapangan seperti kekurangan dan hal-hal berikutnya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

3. Pengembangan dan Pengelolaan UMKM

A. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan berarti sebuah proses, cara, perbuatan mengembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.⁴⁰ Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha.

Perkembangan usaha merupakan sekumpulan aktifitas yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan dan mentransformasi berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Pengembangan merupakan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial dengan memanfaatkan keahlian, teknologi, kekayaan intelektual dan arahan pihak luar untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya yang bertujuan memperluas usaha.

a. Unsur Pengembangan Usaha

Adapun unsur-unsur penting dalam mengembangkan usaha ada 2 unsur yaitu:

a.) Unsur yang berasal dari dalam perusahaan (pihak internal)

- (1) Adanya niat dari si pengusaha/wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.
- (2) Mengetahui teknik memproduksi barang seperti berapa banyak barang yang harus diproduksi, cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan barang/produk dan lain-lain.
- (3) Membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk.

⁴⁰ KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI)

b.) Unsur yang berasal dari luar (pihak eksternal)

- (1) Mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha.
- (2) Mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam seperti meminjam dari luar.
- (3) Mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik/kondusif untuk usaha.
- (4) Harga dan kualitas ialah unsur strategi yang paling umum ditemui. Strategi ini bisa digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa berkualitas prima dan harga yang sesuai atau menghasilkan barang berbiaya rendah dan menjualnya dengan harga yang murah pula.
- (5) Cakupan jajaran produk, suatu jajaran produk atau jasa yang bervariasi yang memungkinkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam satu tempat saja. Hal ini juga bisa mendorong perekonomian yang pada gilirannya akan memberi untung pada konsumen. Namun sebaliknya, sebuah jajaran produk yang sedikit memungkinkan untuk menggali potensi produk tersebut dengan lebih dalam, mungkin termasuk banyak alternative untuk jenis produk yang sama. Variasi produk yang sedikit juga bisa dibandingkan dengan keahlian yang seksama.⁴¹

b. Prinsip-prinsip Pengembangan Usaha

Prinsip-prinsip Pengembangan Usaha terdiri dari:

- 1) Harus dapat diterima oleh semua pihak dan dapat dilaksanakan
- 2) Harus dibuat secara fleksibel dan realistis
- 3) Harus mencakup semua aspek kegiatan usahanya

⁴¹ Risda Pratiwi, "Strategi Pengembangan Usaha Rengginang Pulut Dengan Metode Analisis Swot (Studi Kasus Usaha Rengginang Pulut Cv . Uul Jaya Di Desa Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat)," Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Sumatera Utara, 2018.

4) Harus merumuskan cara-cara kerja efektif dan efisien.

c. Manfaat Perencanaan Pengembangan Usaha

- 1) Sebagai alat untuk membimbing jalannya pelaksanaan pengembangan usaha
- 2) Mengamankan kelangsungan hidup pengembangan usaha
- 3) Meningkatkan kemampuan manajerial dalam rangka pengembangan usaha
- 4) Sebagai pedoman wirausaha dalam pelaksanaan pengembangan usaha
- 5) Sebagai alat untuk mengetahui yang akan terjadi dalam rangka pelaksanaan pengembangan usaha.⁴²

Diakui bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dinegara berkembang, tetapi di negara-negara maju. Di negara maju, tidak hanya menyerap tenaga kerja yang banyak dibandingkan usaha besar, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibanding dari usaha besar. Di negara berkembang, khususnya Asia, Afrika dan Amerika Latin, UMKM juga berperan sangat penting, khususnya dari prespektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi pedesaan. Namun jika dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto dan ekspor non migas masih rendah, dan ini sebenarnya perbedaan mencolok dengan UMKM di negara maju.⁴³

⁴² Sakia Pajriani and Muh Asra, „Pengembangan Usaha Pelaku Bisnis Ritel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Penjual Eceran Sekitar Top Swalayan Kolaka)“, Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, 3 (2020), 234–46

⁴³ Mauli Khairul Hakim, Peran Pembiayaan Kur Terhadap Perkembangan Umkm Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kudus (Study Kasus Bank BRI Syariah Cabang Kudus) (Semarang, 2019).

B. Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.⁴⁴

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁵

Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

⁴⁴ Nugroho, Riant, 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elek Media Komotindo

⁴⁵ George Terry, 2009, Dasar-Dasar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi yang dapat dikelompokkan menjadi POAC (planning, organizing, actually, controlling. Adapun penjelasan POAC dalam manajemen atau pengelolaan, yaitu :

1. *Planning* atau perencanaan adalah pemilihan fakta dan menghubungkan fakta-fakta serta membuat, menggunakan perkiraan kejadian yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. *Organizing* atau pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang terhadap kegiatan-kegiatan, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.
3. *Actually* atau pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Pelaksanaan merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan hasil perencanaan dan pengorganisasian.
4. *Controlling* atau pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apakah perlu melakukan

perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar.⁴⁶

Prinsip pengelolaan erat kaitannya dengan prinsip-prinsip manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut:

- a. Prinsip kemanusiaan
- b. Prinsip demokrasi
- c. Prinsip the right man is the right place
- d. Prinsip equal pay for equal work
- e. Prinsip kesatuan arah
- f. Prinsip kesatuan komando
- g. Prinsip efisiensi
- h. Prinsip efektivitas
- i. Prinsip produktivitas kerja
- j. Prinsip disiplin
- k. Prinsip wewenang dan tanggung jawab.⁴⁷

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan adalah:

- a. Kehangatan dan keantusiasan
- b. Tantangan
- c. Bervariasi
- d. Luwes
- e. Berkenaan hal-hal positif
- f. Penanaman disiplin diri.⁴⁸

⁴⁶ George R. Terry principles of management

⁴⁷ Veithzal, Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 16-18)

⁴⁸ Ahmad Sudrajad, Pengelolaan Pembelajaran, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 30)

Usaha diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dijalankan orang-orang atau badan secara teratur dan terus menerus yaitu berupa kegiatan yang mengadakan barang dan atau jasa maupun fasilitas lain untuk dijual, dipertukarkan atau disewakan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang optimal.⁴⁹ usaha memiliki arti kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan suatu hasil dalam tujuan tertentu.⁵⁰ Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan usaha adalah suatu proses kegiatan dengan melakukan kegiatan tertentu yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam Skripsi ini, dengan maksud mempersatukan persepsi antara penulis dengan pembaca maka penulis akan memberikan pengertian tentang beberapa istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dijalankan oleh perorangan namun dalam skala kecil namun memiliki dampak perekonomian yang menjanjikan baik bagi pelaku usaha, lingkungan usahanya, maupun Negara. Hal ini dikarenakan apabila UMKM memiliki perkembangan selain memberikan kesejahteraan bagi pemilik usaha juga dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan di suatu daerah. Dalam pengembangan UMKM perlu melakukan

⁴⁹ Rambe, Samsier, dkk. 1994. *Pengelolaan Usaha*. Bandung : Angkasa.)

⁵⁰ Satyodirgo, Rulanti. 1979. *Pengelolaan Usaha*. Jakarta : Depdikbud.

pengelolaan secara massif dan efektif agar usaha yang dijalankan dapat dikatakan berhasil. UMKM merupakan usaha yang dijalankan dengan lingkup yang lebih kecil namun memiliki peranan penting untuk pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. UMKM berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, dapat menaggulangi kemiskinan, serta berperan dalam penyediaan barang dan jasa yang mampu meringankan beban pelaku usaha. Dalam penelitian ini UMKM yang dimaksudkan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

2. Peranan

Peranan adalah tindakan yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah tergantung pada suatu kejadian, kondisi, ataupun kebutuhan tertentu. Peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini ada 2 peran yaitu pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM DAN pelaku usaha.

Peran pemerintah adalah peran yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai pelayan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Peran pemerintah yang efektif dalam hal pengembangan UMKM, yaitu:

a) Peran pemerintah sebagai fasilitator

Dalam hal pengembangan pengelolaan UMKM, peran pemerintah harus memfasilitasi UMKM seperti pelatihan dan pendanaan agar UMKM dapat terkelola dan berkembang dengan baik.

b) Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu merancang dan membuat kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada UMKM dalam pengembangan pengelolaan usahanya.

c) Peran pemerintah sebagai katalisator

Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pendorong untuk mempercepat perkembangan UMKM dengan langkah-langkah seperti penghargaan terhadap UMKM, Kelompok UMKM agar dapat kreatif dan produktif untuk mengembangkan usahanya.

Peran pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga atau instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengembangan pengelolaan pusat kuliner di Cempae Kota Parepare. lembaga atau instansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare yang berperan sebagai pemeran utama dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

Peran pelaku usaha dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi pelaku usaha terhadap peran yang dijalankan pemerintah. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi pelaku usaha disimpulkan sebagai berikut :

- a. Partisipasi dalam perencanaan, dalam penelitian ini pelaku usaha berpartisipasi dalam perencanaan karena turut memberikan fakta yang terjadi di lapangan dan membantu memberikan saran.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan, dalam penelitian ini pelaku usaha berpartisipasi dalam pelaksanaan karena pelaku usaha merupakan pihak yang menjalankan dan mendapatkan hasil dari perencanaan dan tindakan pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM.
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dalam penelitian ini pelaku usaha berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil karena pelaku usaha sebagai pihak yang mendapatkan dampak dan manfaat dari perencanaan dan pelaksanaan.
- d. Partisipasi dalam evaluasi, dalam penelitian ini pelaku usaha berpartisipasi dalam evaluasi karena pelaku usaha memberikan keterangan kondisi yang terjadi di lapangan seperti kekurangan dan hal-hal berikutnya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

3. Pengembangan dan Pengelolaan UMKM

A. Pengembangan UMKM

Pengembangan adalah suatu proses memperbaiki kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi atau pihak yang bersangkutan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. Dalam penelitian ini, pengembangan yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan pusat kuliner Cempae Kota Parepare agar dapat meningkatkan daya saing usaha.

Pengembangan usaha dilakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada suatu usaha. Sejatinya pengembangan usaha memiliki prinsip sebagai berikut:

1. Harus dapat diterima oleh semua pihak dan dapat dilaksanakan
2. Harus dapat dibuat secara fleksibel dan realistis
3. Harus mencakup semua aspek kegiatan usahanya
4. Harus merumuskan cara-cara kerja efektif dan efisien

Dalam penelitian ini pengembangan dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip pengembangan usaha yang akan sangat bermanfaat. Pengembangan usaha dalam penelitian ini dapat dilakukan secara bersama baik oleh Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM maupun pelaku usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

B. Pengelolaan UMKM

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi yang dapat dikelompokkan menjadi POAC (planning, organizing, actually, controlling. Adapun penjelasan POAC dalam manajemen atau pengelolaan, yaitu :

1. *Planning* atau perencanaan adalah pemilihan fakta dan menghubungkan fakta-fakta serta membuat, menggunakan perkiraan kejadian yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. *Organizing* atau pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang terhadap kegiatan-kegiatan, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang,

yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

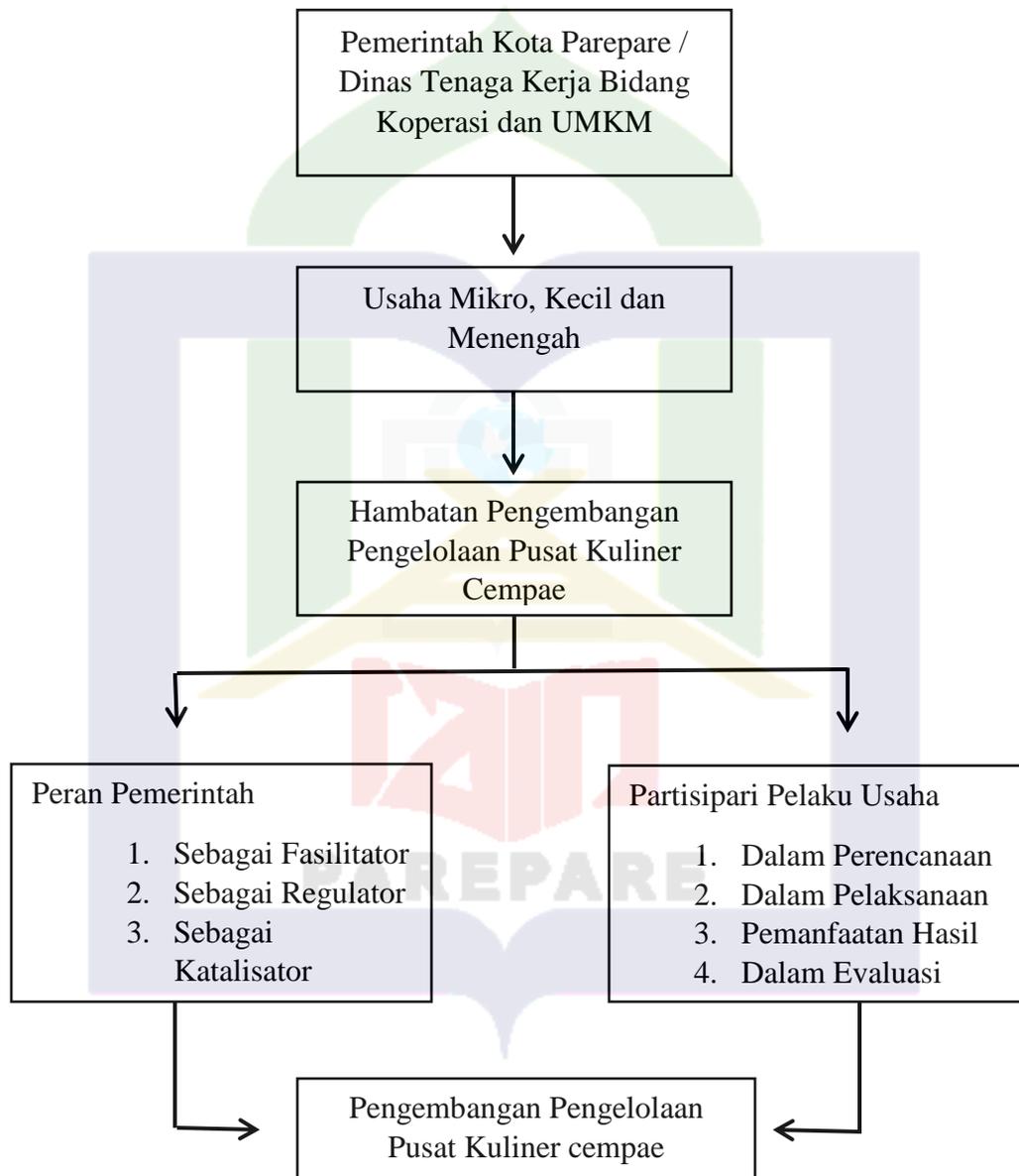
3. *Actually* atau pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Pelaksanaan merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan hasil perencanaan dan pengorganisasian.
4. *Controlling* atau pengawasan pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apakah perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar.

Dalam penelitian ini menggunakan POAC guna menjalankan usaha akan sangat bermanfaat karena cara menjalankan usaha akan lebih teratur sehingga memudahkan pelaku usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare dalam menjalankan usahanya.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan proposal yang membahas tentang peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare, kerangka pikir ini bertujuan sebagai landasn sistematis untuk berfikir dalam menguraikan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bagan kerangka pikir yang disajikan di bawah ini, peneliti menguraikan masalah peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare, dengan mengetahui penyebab serta dampaknya dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare maka akan mudah

memberikan solusi terhadap permasalahan pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan bagan kerangka pikir diatas penulis dapat menguraikan bahwasanya pemerintah Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai peran yaitu sebagai fasilitator (penyedia fasilitas). Sebagai regulator (alat pengatur), sebagai katalisator (menyebabkan terjadinya perubahan)⁵¹ dan pelaku usaha Pusat Kuliner Cempae mempunyai peran sebagai partisipan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dalam evaluasi keduanya memiliki peran penting dalam melaksanakan pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare. Setelah pemerintah melakukan pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana peran, hambatan, dan solusi yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

⁵¹ Gede Diva: 2009 Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah, Bakrie School of Management : Jakarta

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian peneliti, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, penelitian tergolong dalam penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif deskriptif yang dominan menggunakan analisis. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berusaha mendeskripsikan, merekam, menganalisis dan menginterpretasikan topik, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di pusat kuliner Cempae Kota Parepare yang terletak di Jalan Tanggul Cempae Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sebelumnya peneliti telah melakukan observasi awal di Pusat Kuliner Cempae dan dari hasil observasi tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada lokasi tersebut.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan sekitar 2 bulan disesuaikan dengan waktu yang disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan penulis untuk meneliti.

⁵² Mardalis, metode penelitian: suatu pendekatan proposal. Cet 7 (Jakarta; bumi aksara 2004) h.26

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, maka fokus penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui Peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi dan wawancara,. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara pada Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi Dan UMKM dan pelaku usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.. Data penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pegawai dinas tenaga kerja bidang koperasi dan UMKM dan pelaku usaha Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan Langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu

penelitian kualitatif adalah wawancara, kuesioner, dan observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu observasi wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah peninjauan, pengamatan peninjauan secara cermat. Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Observasi dilakukan untuk mengamati kejadian yang ada ditengah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait judul yang diangkat oleh penulis. Observasi telah dilakukan oleh penulis di Pusat Kuliner Cempae Parepare.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Sederhananya dapat dikatakan bahwa wawancara(interview) adalah suatu peristiwa atau proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung.⁵³Pada penelitian ini yang akan menjadi informan adalah pegawai dinas tenaga kerja bidang koperasi dan UMKM dan pelaku usaha pusat kuliner Cempae Parepare. Data akan dikumpulkan melalui proses

⁵³ H.S kartoeredjo "kamus baru kontemporer", (Bandung: PT remaja rosdakarya offset, 2014) h.258

wawancara langsung dengan para informan tersebut dengan menggunakan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Penelusuran referensi (reference exploring) yaitu metode pengumpulan data dimana penulis menelusuri dan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data dengan penelusuran referensi ini sangat diperlukan dalam menemukan data-data dari berbagai referensi yang ada untuk dijadikan data tambahan dalam memperkuat data dan hasil yang bersumber dari penelitian.⁵⁴ Penulis akan mengumpulkan data-data berupa referensi yang bersumber dari penelitian dan data dari Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare.

2. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul dan diperoleh dari lapangan diolah menjadi 4 (empat) tahapan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing (pemeriksaan data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁵⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing

⁵⁴ Sugiyono, metode penelitian kombinasi (mix method) , (bandung, Alfabeta, 2015), h.240

⁵⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

terhadap hasil wawancara dari informan yang berhubungan langsung dengan pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Parepare.

b. Classifying (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang di dapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁵⁶ Hal ini dilakukan agar data ditelaah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. Verifying (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁵⁷ Pada penelitian ini data yang diperoleh dari informan di verifikasi guna memperoleh data yang valid yang berhubungan langsung Pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

d. Concluding (kesimpulan)

Selanjutnya adalah concluding, yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 1993), h. 104-105.

⁵⁷ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian*, (Bandung: PT. Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, *verifying* *analyzing*.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada obyek penelitian sehingga keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.⁵⁸

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Penetapan kriteria derajat kredibilitas pada dasarnya validitas internal pada penelitian kualitatif. Kriteria ini berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang diteliti. Untuk memperoleh data yang sah penelitian ini, peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, analisis kasus *negative*, teknik triangulasi menggunakan bahan referensi dan menggunakan *Member Check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan (*transferability*), pada dasarnya merupakan validitas eksternal pada penelitian kualitatif. Dapat terpenuhi dengan memberikan deskripsi secara rinci dan mendalam tentang hasil dan konteks penelitian. Keteralihan bergantung pada

⁵⁸ Tim Penyusun, Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi, IAIN PAREPARE, 2020, h. 24.

kesamaan konsep antar konteks pengirim dan penerima. Tujuan dari keteralihan ini agar orang lain dapat memahami hasil penelitian, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Kebergantungan/Reliabilitas (*Dependability*)

Dependability dalam penelitian kualitatif disebut reliabilitas. Suatu penelitian dikatakan *dependability* apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses peneliti. Caranya dilakukan oleh auditor yang independent atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Kepastian/dapat dikonfirmasi (*Confirmability*)

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektif penelitian. Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian yang dilakukan merupakan fungsi dan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Uji kepastian dapat diperoleh dengan cara mencari persetujuan beberapa orang termasuk dosen pembimbing terhadap pandangan, pendapat tentang hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian, dalam hal ini adalah data-data yang diperlukan.⁵⁹

⁵⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (CV: Alfabeta, Bandung, 2009), h. 269-277.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman terbagi atas tiga kegiatan analisis data secara serempak, yaitu: (1) Reduksi data (Data reduction); (2) Data Display (Display data); dan (3) Penarikan Kesimpulan/verifikasi.⁶⁰

a. Reduksi Data

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tulis lapangan (Written-up field notes). Oleh karena itu data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Ini berarti pula reduksi data telah dilakukan sebelum pengumpulan data dilapangan.

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana yang akan diberi kode, mana yang ditarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam suatu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

b. Data Display

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada waktu melakukan reduksi data pada hakikinya sudah penarikan kesimpulan, dan pada waktu penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah direduksi dan juga dari display data. Kesimpulan bukan dibuat sekali jadi.

⁶⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 244.

Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain, namun perlu diingat bahwa seandainya menambah data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam hal ini, peneliti memaparkan temuan-temuan yang berkaitan dengan fokus penelitian pada skripsi ini. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dan beberapa pelaku UMKM di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare. Fokus penelitian yang ada dalam penulisan skripsi ini ada 3 poin, yaitu :

1. Peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan informasi mengenai Peran Dinas Tenaga Kerja, Bidang Koperasi dan UMKM dalam pengembangan Pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare. Tentunya dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM berperan penting dalam membantu pelaku usaha agar lebih maju dan berkembang. Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM sendiri secara masif memberdayakan dan membina pelaku usaha yang berada di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang bagian Koperasi dan UMKM Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare :

“Peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare saat ini memberikan bantuansarana fasilitas berupa tempat usaha dan peralatan usaha. Saat ini bangunan usaha sudah ada pemanfaatan dan sedang direncanakan untuk pengadaan peralatan usaha yaitu berupa pembakaran ikan karena lokasi Pusat Kuliner Cempae sangat dekat dengan pelelangan ikan. Fasilitas tersebut ditujukan kepada pelaku usaha Pusat Kuliner Cempae yang sudah terdaftar. Fasilitas tersebut dapat digunakan dengan mudah karena pengadaan fasilitas sesuai dengan apa yang diajukan dan dibutuhkan pelaku usaha. Manfaat dari pemberian fasilitas tersebut diharapkan dapat

memberikan peningkatan terhadap perekonomian pelaku usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.⁶¹

Tambahan wawancara dari Hendra Wijaya selaku Staf bagian Koperasi dan UMKM Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare sebagai berikut :

“Terkait dengan fasilitas yang diberikan ke Pelaku Usaha di Kawasan kuliner Cempae berupa pemanfaatan kios yang tersedia, selain itu fasilitas berupa pendampingan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui penerbitan perizinan (Nomor Induk Berusaha) dan edukasi seputar tata Kelola tempat usaha. Fasilitas yang diberikan bukan berupa hak milik, melainkan hak guna berupa losd atau kios sebanyak 22 kepada 22 pelaku usaha. Penyerahan Kunci Kios Pusat Kawasan Kuliner Cempae dilakasakan pada Hari Rabu, 22 November 2022. Pada kesempatan ini, bapak Wali Kota Parepare yang langsung menyerahkan kunci kios tersebut. pemanfaatan Kios di perutukkan kepada Pelaku usaha yang memang dulunya menjual di area itu sebelum adanya renovasi, dan merupakan warga kecamatan Soreang. Selain fasilitas kios, perizinan juga sebagai saah satu bentuk support pemerintah terhadap pelaku usaha disana, perizinan tentunya merupakan hal wajib yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti berkesimpulan bahwa peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM adalah sebagai instansi yang bertanggung jawab memfasilitasi, membina, mendampingi baik uaha maupun segala kebutuhan usaha seperti administrasi perizinan, memberikan informasi dan pengetahuan kepada pelaku usaha.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare hambatan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

“kendala yang dihadapi relative, saat ini pelaku usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare belum matang mengenai konsep pasti usaha yang akan dijalankan,

⁶¹ Wawancara bersama bapak Andi Sunra selaku kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Tenaga Kerja Kot Parepare, rabu 19 juli 2023.

⁶² Hendra Wijaya , staf Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare.20 juli 2023

semestinya harus difokuskan ingin berusaha dibidang apa, perlu ada manajemen yang baik dalam mengelola usahanya⁶³

Tambahan hasil wawancara dari Hendra wijaya staf Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare sebagai berikut :

“Hambatan dari pembinaan untuk pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare ada seperti umur rata-rata yang sudah melewati masa produktif dalam pengembangan usaha dari sektor pemahaman teknologi dan penerapan konsep pengembangan usaha namun dengan edukasi secara berkala bukan tidak mungkin untuk mencapai output yang positif nantinya.”⁶⁴

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas penulis berkesimpulan bahwa hambatan dari sisi pandangan Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare yaitu tidak adanya konsep yang pasti mengenai usaha apa yang akan dijalankan, tidak adanya fokus usaha apa yang akan dijalankan karena usaha yang dijalankan selalu berubah ubah sehingga tidak ada konsistensi, umur rata-rata melewati masa produktif sehingga sulit dalam pemahaman pengetahuan kewirausahaan, pemahaman teknologi dan penerapan konsep pengembangan usaha.

Berikut wawancara hambatan dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare dari sisi pelaku usaha:

Ibu Sappe selaku pelaku usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare
 “Berjualan selama satu tahun lebih, pendapatan hingga saat ini belum dapat dikatakan penghasilan yang didapatkan perhari sebanyak Rp 20.000/ hari, toko posisinya terlalu ke dalam tidak terlihat dari depan tidak berhadapan langsung dengan Anjungan Cempae jadi orang belanja hanya di depan Anjungan Cempae saja.”⁶⁵

Ibu Nurul Taqwa selaku pemilik Usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare
 “Berjualan di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare setelah direnovasi ini sudah berjalan satu tahun lebih, pendapatan tidak bisa dibilang meningkat paling banyak

⁶³ Wawancara dengan bapak Andi Sunra selaku Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, 19 juli 2023

⁶⁴ Hendra Wijaya , staf Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare.20 juli 2023

⁶⁵ Wawancara dengan ibu sappe pemilik usaha Pusat Kuliner Cempae 14 juli 2023

Rp 40.000 lebih sedikit sebelum direnovasi karena pelanggan tetap sudah tidak pernah belanja lagi, pelanggan Cuma datang pada waktu pagi saja setelah itu sudah tidak ada pembeli. Kami sebagai penjual tetap berterimakasih karena sudah diberikan bantuan hanya saja penghasilannya belum kembali ormal seperti sebelumnya.”⁶⁶

Ibu Nurhalia selaku pemilik usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare

“Saya menjual sudah satu tahun lebih setelah diperbaiki disini penghasilan didapatkan Rp 30.000 masalahnya karena didaerah cempae ramai tapi hanya di depan Anjunga Cempae saja tidak datang kesini karna lokasinya terlalu disamping sementara ada penjual di depan anjungan pakai gerobak berjualan di trotoar lebih dekat dengan Anjungan Cempae.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari pandangan pelaku usaha maka penulis berkesimpulan bahwa Hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare yaitu lokasi lods yang sangat kebelakang tidak Nampak dari depan, lokasinya terlalu berjarak dari pusat keramaian, adanya penjual yang berjualan di trotoar depan Anjungan Cempae sehingga pengunjung tidak berbelanja di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

3. Solusi yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas

Tenaga Kerja Kota Parepare solusi yang diberikan yaitu sebagai berikut :

“saat ini untuk mengatasi hambatan pengembangan pengelolaan UMKM kami dari Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM memberikan edukasi seputar cara untuk mengembangkan usaha, membantu untuk mendapatkan izin usaha karena ini penting, membantu pemilik usaha untuk mendapatkan permodalan dengan kemitraan dengan perbankan, diberikan fasilitas dan alat pendukung usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan usaha dan target pasar di daerah itu, pembinaan, membantu pemahaman teknologi agar usaha bisa maju karena sekarang penggunaan

⁶⁶ Wawancara ibu Nurul Taqwa pemilik usaha Pusat Kuliner Cempae 17 juli 2023

⁶⁷ Wawancara Ibu Nurhalia pemilik usaha Pusat Kuliner Cempae 17 juli 2023

teknologi untuk usaha manfaatnya sangat luar biasa bisa meningkatkan income pelaku usaha.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis berkesimpulan bahwa solusi yang diberikan Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare melakukan pemberian edukasi seputar pemanfaatan teknologi dan kemampuan usaha guna meningkatkan pendapatan pelaku usaha, menyediakan alat pendukung usaha agar pelaku usaha dapat lebih mudah, untuk meningkatkan usaha membantu menghubungkan pelaku usaha bermitra dengan perbankan, membantu perizinan usaha dan sertifikasi usaha agar usaha tersebut dapat dipercaya sehingga mampu menarik pelanggan.

B. Pembahasan

1. Peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

Peran dalam pembahasan penelitian ini ada 2 yaitu peran pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare dan pelaku usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

Peran Pemerintah dalam penelitian ini terbagi tiga, yaitu

- a. Sebagai fasilitator artinya pemerintah menjalankan peran sebagai pihak yang memfasilitasi UMKM Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare menjalankan perannya sebagai fasilitator dengan memfasilitasi tempat usaha, bangunan usaha berupa lods,

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Andi Sunra selaku Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, 19 juli 2023

- alat pendukung usaha, perizinan usaha, sertifikasi halal gratis, pelatihan, pendampingan dan pembinaan, dan membantu menghubungkan pelaku usaha dengan perbankan untuk mendapatkan modal terhadap pelaku usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.
- b. Peran pemerintah sebagai regulator artinya pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare dalam menjalankan perannya sebagai regulator membuat kebijakan untuk mempermudah pelaku usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare seperti pembuatan nomor izin berusaha (NIB), sertifikasi halal gratis dari BPJH.
- c. Peran pemerintah sebagai katalisator artinya pemerintah berperan sebagai pendorong untuk mempercepat perkembangan agar pelaku usaha dapat berkembang. Dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare dalam menjalankan perannya sebagai katalisator yaitu dengan membina dan mendampingi usaha tersebut memberi masukan dan kebutuhan usaha agar terjadi perubahan yang baik sehingga usaha dapat berkembang. Selain itu Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM memberikan pelatihan bagi UMKM secara gratis agar pelaku usaha memiliki pengetahuan untuk mengembangkan usahanya.

Peran pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjalankan perannya sebagai pelayan publik dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hubungan peran pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dengan penelitian ini yaitu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah sebagai upaya dalam mengembangkan usaha khususnya Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare. Untuk dapat memecahkan permasalahan pada usaha maka peran dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM sangat dibutuhkan agar dapat mengatasi permasalahan pendapatan rendah yang dialami pelaku usaha Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

Jadi dapat disimpulkan bahwa saat ini Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare memberi fasilitas lebih terhadap UMKM, bila terdapat masalah yang dihadapi oleh UMKM akan di bantu dan oleh Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare dengan memberikan pendampingan, dan pembinaan untuk memudahkan UMKM dalam menyelesaikan hambatan agar dapat meningkatkan penghasilan, sehingga memberi dampak ekonomi yang baik.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare telah sesuai dengan anjuran agama Islam diantaranya menyediakan dan menciptakan sesuatu yang bernilai dan berguna bagi masyarakat serta memberikan kemudahan baik berupa barang maupun jasa. Barang yang dimaksud adalah fasilitas dan alat-alat pendukung, sedangkan jasa adalah kegiatan edukasi, pendampingan dan pembinaan Yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat pemilik usaha Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

Islam adalah akidah, syariat, dan kerja. Kerja di sini meliputi ibadah, kemauan bekerja keras dalam mencari nafkah serta menumbuh kembangkan nilai- nilai kebaikan. Allah memerintahkan hambanya untuk berusaha guna mencari karunia di seluruh Dunia.

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari pada ibadah dan jihad.

Bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya, dan tidak melupakan-Nya. Selain dari pada itu Allah SWT menerangkan bahwa telah menganugerahkan karunia yang banyak terhadap hamba-hambanya, sebagaimana firman Allah

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Q.S At – Taubah Ayat 105.

Makna yang terkandung surat At Taubah ayat 105, terdapat motivasi untuk beramal dan tentang etos kerja. Melalui ayat ini, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk beramal, bekerja, berusaha, dan banyak berbuat kebaikan. Ayat ini memotivasi kepada kita untuk terus beramal dan bekerja dengan sungguh-sungguh.⁶⁹

⁶⁹ Quran dan terjemahan, (Departemen Agama RI), Surah At-Taubah ayat 105

Selanjutnya yaitu peran pelaku usaha yang dapat diartikan sebagai partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae.

- a. Partisipasi dalam perencanaan, yaitu memberikan fakta-fakta lapangan dan kebutuhan usaha lalu kemudian diajukan kepada Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan yaitu menjalankan perannya sebagai pelaku usaha dengan hasil perencanaan yang telah disepakati dengan Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare.
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil yaitu memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare berupa lods usaha, alat pendukung usaha, bantuan kerjasama dengan perbankan dapat digunakan sebagai upaya mendapatkan modal usaha, memanfaatkan program perizinan usaha dan sertifikasi usaha gratis.
- d. Partisipasi Evaluasi yaitu menganalisis apa yang menjadi kekurangan dalam menjalankan usaha lalu berkonsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare untuk mendapatkan solusi atas kekurangan atau hambatan usaha yang terjadi.

Pusat Kuliner Cempae merupakan sarana baik bagi pelaku usaha Pusat Kuliner Cempae Maupun Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare agar bisa mendorong dan memotivasi mereka untuk lebih giat bekerja dan berusaha. Di samping itu keberadaan Pusat Kuliner Cempae ini juga telah berperan untuk membentuk Masyarakat di daerah tersebut untuk menjadi masyarakat yang berkualitas karena mampu meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

2.. Hambatan yang dihadapi dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Kota Parepare.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan peneliti di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare mengenai faktor yang menjadi hambatan peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare. Berdasarkan hasil data wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman dari pelaku usaha terkait kewirausahaan, hal ini membuat usaha tidak mampu berkembang karena untuk membuat usaha lebih maju perlu pengetahuan dan strategi contohnya mencocokkan usaha yang dijalankan dengan lingkungan usaha.
2. Tidak ada konsep yang pasti mengenai usaha apa yang akan dijalankan. Apabila tidak ada konsep yang pasti maka usaha dapat dikatakan inkonsistensi sehingga membuat pelanggan bingung terhadap usaha yang dijalankan karena selalu berubah-ubah.
3. Belum mampu memanfaatkan Teknologi dalam mengembangkan usaha. Diera saat ini pemanfaatan teknologi merupakan hal krusial yang harus dipahami. Teknologi saat ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap penggunaanya.
4. Usia yang tidak lagi produktif menjadi penghambat karena kemampuan memahami pengetahuan kewirausahaan tidak lagi sama dengan usia produktif yang mampu dengan cepat dan tepat memahami.

5. Kurangnya modal dalam menjalankan usaha, masalah ini dianggap baik pelaku usaha kecil, menengah maupun pada usaha yang berskala besar. menjadi masalah yang kerap terjadi bagi para pelaku usaha
6. Persaingan usaha yang ketat dengan usaha yang berada tepat di trotoar Anjungan Cempae Kota Parepare membuat pelanggan tidak tertarik untuk datang ke Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare karena lokasinya yang lebih berjauhan dari pusat keramaian Anjungan Cempae dibanding usaha yang berjualan di trotoar.

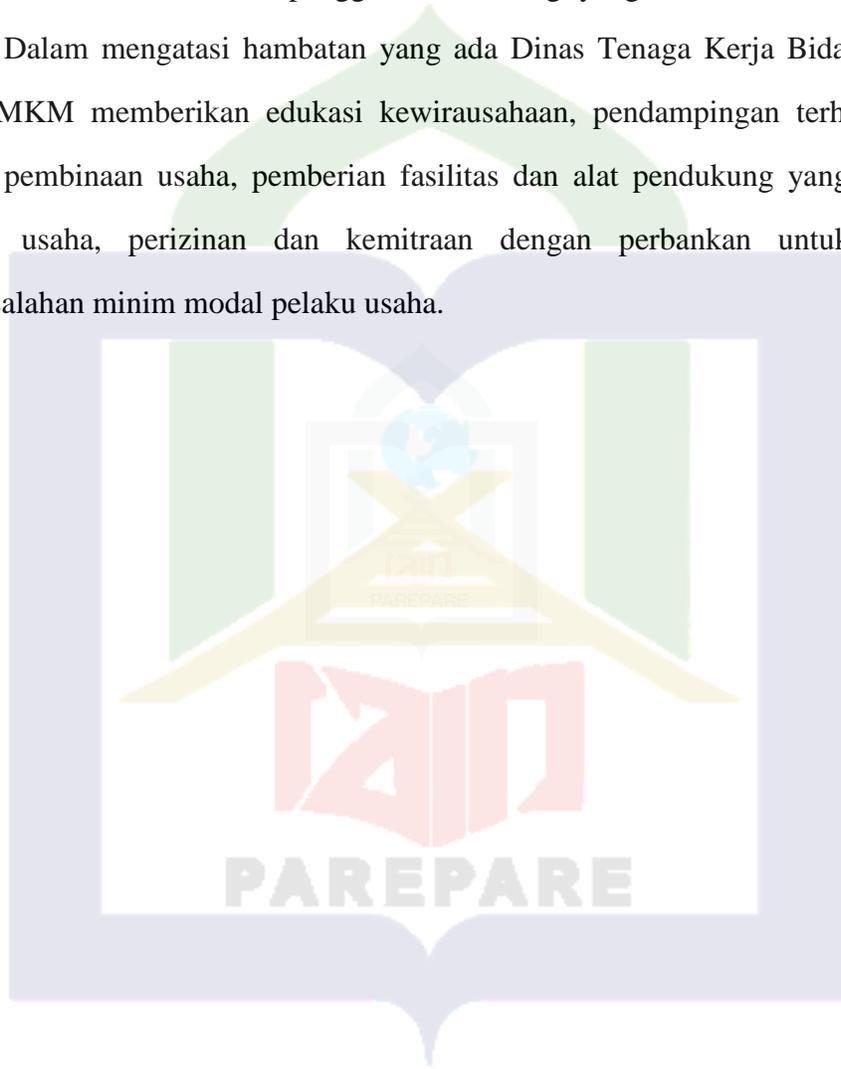
Hambatan tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha dan pendapatan usaha sehingga perlu upaya untuk memperbaiki dan mengatasi permasalahan usaha agar terjadi kemajuan bagi usaha yang dijalankan.

3. Solusi yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare.

Dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae yang memiliki hambatan berdasarkan temuan hasil wawancara dapat diselesaikan dengan solusi yaitu Kurangnya pemahaman dari pelaku usaha terkait kewirausahaan hal ini dapat diselesaikan dengan cara pelatihan dan edukasi terkait kewirausahaan misalnya pelatihan cara dan strategi menjalankan usaha. Permasalahan tidak ada konsep yang pasti mengenai usaha apa yang akan dijalankan, hal ini harus diputuskan oleh pelaku usaha untuk menjalankan usaha seperti apa agar usaha yang dijalankan memiliki konsistensi dengan melihat kondisi lingkungan di sekitar Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare seperti apa. Selain itu dalam menjalankan usaha di era saat ini sangat

penting adanya pemanfaatan teknologi sebagai upaya melakukan promosi dan memperkenalkan usaha kepada khalayak umum sehingga pelanggan tidak hanya berpatokan pada pembeli yang berada di sekitar tempat usaha namun juga yang berasal dari sosial media atas penggunaan teknologi yang ada.

Dalam mengatasi hambatan yang ada Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM memberikan edukasi kewirausahaan, pendampingan terhadap pelaku usaha, pembinaan usaha, pemberian fasilitas dan alat pendukung yang dibutuhkan pelaku usaha, perizinan dan kemitraan dengan perbankan untuk mengatasi permasalahan minim modal pelaku usaha.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Pengembangan di Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare, yang telah dilakukan oleh penulis maka telah disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare yaitu sebagai fasilitator dengan memberikan fasilitas, alat pendukung usaha, perizinan, edukasi, pembinaan dan pendampingan serta kebutuhan lainnya yang memberikan dampak pengembangan bagi usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare, selanjutnya sebagai regulator yaitu sebagai pihak yang membuat kebijakan guna memudahkan dan membantu pengembangan pengelolaan usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare, serta sebagai katalisator yaitu sebagai pendorong untuk mempercepat pengembangan pengelolaan usaha agar dapat kreatif dan produktif agar dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh kesejahteraan hidup yang baik.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM Kota Parepare dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae adalah Kurangnya pemahaman dari pelaku usaha terkait kewirausahaan, Tidak ada konsep yang pasti mengenai usaha apa yang akan dijalankan, Belum mampu memanfaatkan Teknologi dalam mengembangkan usaha, Usia yang tidak lagi produktif, Kurangnya modal dalam menjalankan

usaha dan Persaingan usaha yang ketat dengan usaha yang berada tepat di trotoar Anjungan Cempae Kota Parepare.

3. Solusi yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi Dan UMKM Kota Parepare dalam pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare, yaitu Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare. Seperti pembinaan, pendampingan, pemberian fasilitas dan alat pendukung usaha, maupun pengurusan izin usaha.

B. Saran

1. Bagi pemerintah daerah lebih ditingkatkan lagi dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah khususnya di Pusat Kuliner Cempae secara lebih maksimal dan menata para pelaku usaha di sekitar Anjungan Cempae agar kesejahteraan penduduk di Kota Parepare meningkat khususnya bagi pelaku usaha Pusat Kuliner Cempae. Hal ini disebabkan UMKM adalah salah satu cara untuk mengurangi pengangguran serta pengentasan kemiskinan di wilayah Kota Parepare.
2. Bagi para pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik lagi, selalu berinovasi agar produksi menjadi meningkat, dan lebih banyak lagi mengajak masyarakat sekitar untuk bekerja, membuka lapangan pekerjaan.

3. Bagi akademik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan daftar bacaan, referensi, dan dapat memberikan sumbangan pembendaharaan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Parepare.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun kajian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis teliti



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005)

Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Ahmad Sudrajad, *Pengelolaan Pembelajaran*, (Jakarta: Grasindo, 2001)

Britha, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999)

Diva, G, *Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Bakrie School of Management, 2009)

George Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

Harahap, Sofyan Syafri, *Analisis kritis atas laporan keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

H.S kartoeredjo, “*kamus baru kontemporer*“, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014)

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Laksa parascita, Anton Sudiyanto, Gunawan Nusanto, “*Rencana Reklamasi Pada Lahan Bekas Penambangan Tanah Liat Di Kuari Tlogowaru PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pabrik Tuban Jawa Timur*“ vol 11, 2015

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 1993)

Mardalis, *metode penelitian: suatu pendekatan proposal* (Jakarta; bumi aksara 2004)

M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai pondasi perekonomian Indonesia* (PT Glora Aksara Pratama, 2017)

Mubyarto, *Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan, Kajian Bersama Pengembangan Kebijaksanaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997)

Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian*, (Bandung: PT. Sinar Baru Argasindo, 2002)

Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta: PT Elek Media Kompotindo, 2003)

Pandji Anoraga, *koperasi, kewirausahaan, dan usaha kecil*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)

Rambe, Samsier, dkk, *Pengelolaan Usaha*, (Bandung : Angkasa 1994)

Ria angin dan andini purwaningrum, “*program pemberdayaan masyarakat, oleh dinas koperasi dan usaha mikro bagi pengusaha kecil di kecamatan sumpalsari kabupaten jember*“ (penguatan komunitas local menghadapi era global)

Satyodirgo, Rulanti, *Pengelolaan Usaha* (Jakarta : Depdikbud, 1979)

Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, Dan Strateginya)*, (Jakarta : Bumi Aksara 2003)

Sugiyono, *metode penelitian kombinasi (mix method)*, (bandung, Alfabeta, 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (CV: Alvabeta, Bandung, 2009)

Slamet, M. *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. (Bogor: IPB Press, 2003)

Tambunan, tulus, *usaha mikro kecil dan menengah Indonesia: isu-isu penting : LP3ES*, 2012)

Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (IAIN PAREPARE, 2020)

Tri Siwi Agustina, *Kewirausahaan Teori Dan Penerapan Wirausahaan Dan UMKM Di Indonesia* (Jakarta; Mitra Wacana Media, 2015)

Veithzal, Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Artikel/jurnal

Andi Ayu Frihatni, Irmayanti Sudirman, Frengky Mandacan, Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja UMKM dan Strategi Bisnisnya: Studi Kasus UMKM Irrenuang Parepare di Indonesia, Vol 22 No 2, 2022

Ir. Sri Hariyani, Pentingnya Partipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan, 2017

Jurnal litbang Sukowati Vol 5, Kemiskinan dan Lingkungan : Perpektif Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan, 2021

Kanfer, R Task-specific motivation:An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, and determinants. Journal of Social and Clinical Psychology, 1987

Ndraha talidzuhu, kibernologi dan kepomongprajaan, banten sirao credantia center, 2008

Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM di Indonesia", jurnal ilmiah Cano Ekonomos , Vol 6, 2017

Skripsi

Dicky darmawan, judul skripsi "peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Barru" skripsi sarjana jurusan ilmu administrasi Negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020

Mauli Khairul Hakim, judul skripsi "Peran Pembiayaan Kur Terhadap Perkembangan Umkm Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kudus" (Study Kasus Bank BRI Syariah Cabang Kudus) skripsi sarjana jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2019

Nurul Annisa Mukhtar, Judul Skripsi "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif Bidang Kuliner Di Kota Palopo" Skripsi Sarjana Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021

Rahmadayanti S, Judul Skripsi "Peran Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Buton Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton" Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, 2020

Rani Yanti, Judul Skripsi, "Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UMKM Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Jambi ,

Skripsi Sarjana, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

Risda Pratiwi, judul skripsi “Strategi Pengembangan Usaha Rengginang Pulut Dengan Metode Analisis Swot (Studi Kasus Usaha Rengginang Pulut Cv . Uul Jaya Di Desa Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat),” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Sofiy Hasbiyyah, Judul Skripsi, “Strategi Pengembangan UMKM Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UKM Kabupaten Banyumas” Skripsi Sarjana, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018

Sakia Pajriani, Muh Asra, Pengembangan Usaha Pelaku Bisnis Ritel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Penjual Eceran Sekitar Top Swalayan Kolaka)”, Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, 2020

Data pendukung

Kementrian Kordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia siaran pers HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Peraturan walikota Parepare nomor 13 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas tenaga kerja.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 2 dan 3

UU No. 20 Tahun 2008 pasal 7 ayat (1) tentang UMKM

UU No. 20 tahun 2008 pasal 21 tentang UMKM



LAMPIRAN - LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4183/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2027
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : TZAZA AULIA SYAFIRA
 Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 12 AGUSTUS 2001
 NIM : 19.2400.089
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
 Semester : VIII (DELAPAN)
 Alamat : BTN PONDOK BAHAGIA INDAH PANROKO, KELURAHAN
 BUMI HARAPAN, KECAMATAN BACUKIKI BARAT, KOTA
 PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERAN DINAS TENAGA KERJA BIDANG KOPERASI DAN UMKM DALAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PUSAT KULINER CEMPAE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 12 Juli 2023
 Dekan,



Muztalifah Muhammadun

SRN IP000682



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 685/IP/DPM-PTSP/7/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **TZAZA AULIA SYAFIRA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **PONDOK BAHAGIA INDAH PANROKO, KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN DINAS TENAGA KERJA BIDANG KOPERASI DAN UMKM DALAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PUSAT KULINER CEMPAE**

LOKASI PENELITIAN : **1. DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE**
2. KECAMATAN SOREANG (PUSAT KULINER CEMPAE)

LAMA PENELITIAN : **13 Juli 2023 s.d 13 Agustus 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **17 Juli 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
 DINAS TENAGA KERJA
 Jln. Jend Sudirman No.61 Telp. (0421) 21559 Fax. (0421) 23517
 Email disnaker@pareparekota.go.id
 P A R E P A R E 9 1 1 2 2

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000/199/Disnaker

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BASUKI BUSRAH, SE., M.Si
 Nip : 19750206 200312 1 012
 Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare
 Instansi : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare

Menerangkan bahwa :

Nama : TZAZA AULIA SYAFIRA
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
 Alamat : Pondok Bahagia Indah Panroko, Kota Parepare

Yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian/wawancara dengan judul penelitian **"PERAN DINAS TENAGA KERJA BIDANG KOPERASI DAN UMKM DALAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PUSAT KULINER CEMPAE"** yang dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli 2023 s.d 26 Juli 2023 pada Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Juli 2023

KEPALA DINAS,



BASUKI BUSRAH, SE, M.Si
 Pembina Muda / IV.b
 NIP.19750206 200312 1 002

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 telp (0421) 21307</p> <hr/> <p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>
---	--

NAMA MAHASISWA : TZAZA AULIA SYAFIRA
 NIM : 19.2400.089
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : PERAN DINAS TENAGA KERJA BIDANG
 KOPERASI DAN UMKM DALAM
 PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PUSAT
 KULINER CEMPAE KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Fasilitas apa yang diberikan dinas tenaga kerja bidang koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan pusat kuliner Cempae?
2. Berupa apa fasilitas yang diberikan?
3. Kapan fasilitas tersebut diberikan ?
4. Kepada siapa fasilitas tersebut diberikan ?
5. Apakah fasilitas tersebut dapat digunakan dengan mudah oleh pelaku usaha ?
6. Apa manfaat dari pemberian fasilitas tersebut?
7. Bagaimana keberlanjutan fasilitas tersebut ?

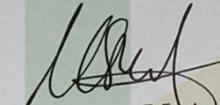
8. Bagaimana kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam hal ini dinas tenaga kerja bidang koperasi dan UMKM dalam pengembangan pengelolaan pusat kuliner Cempae ?
9. Apa saja bentuk pengembangan pengelolaan pusat kuliner yang dilakukan ?
10. Apa saja yang dibutuhkan untuk pengembangan pengelolaan pusat kuliner Cempae ?
11. Apakah ada kendala yang dialami selama proses pengembangan pengelolaan pusat kuliner Cempae berlangsung?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 2023

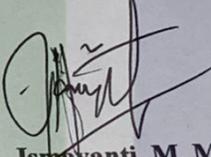
Mengetahui,

Pembimbing Utama


Dr. Usman, M. Ag

NIP . 19700627 2008011 010

Pembimbing Pendamping


Ismayanti, M. M

NIP. 2021068102

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

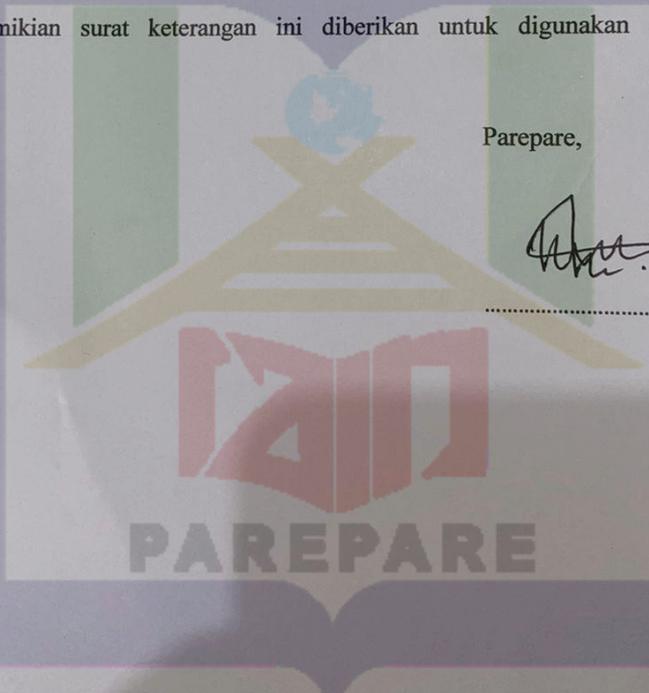
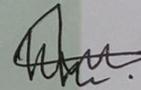
Nama : Nurhalia
Alamat : Jl Petta unge Parepare
Umur : 34
Jenis Kelamin : perempuan
Pekerjaan : Penjual di pusat kuliner Cempae

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Tzaza Aulia Syafira, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi Dan Umkm Dalam Pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

2023



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

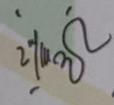
Nama : Ibu Nurul Hafidza
Alamat : Soreang Cempae
Umur : 33
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Penjual di pusat Kuliner Cempae .

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Tzaza Aulia Syafira, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi Dan Umkm Dalam Pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

2023



IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sappe
Alamat : Soreang, Cempae
Umur : 62
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Penjual di pusat Kuliner Cempae

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Tzaza Aulia Syafira, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peran Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi Dan Umkm Dalam Pengembangan pengelolaan Pusat Kuliner Cempae Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

2023



PALEPARE

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara bersama ibu Nurul Taqwa



Wawancara bersama Ibu Nurhalia



Wawancara bersama ibu Sappe



Wawancara bersama Dinas Tenaga Kerja



**DATA PENERIMA LODS DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN
UMKM KOTA PAREPARE**

No.	Nama	No. Lods	Nama Usaha
1.	Bungawati	1.	Warung Bungawati
2.	I Sitti	2.	Warung Sitti
3.	Kaderia	3.	Warung Berkah
4.	Nuraini	4.	Warung Sinar
5.	Nur Ramlah	5.	Warung Bugis
6.	Nurhalia	6.	Warung Nurhalia
7.	Jamila	7.	Nun Biru
8.	Nurul Takwa	8.	Warung Nurul
9.	Hasna Colleng	9.	Warung Sipakainge
10.	Erna	10.	Warung Iis
11.	Mardiana	11.	7 Wali Wali
12.	Maryam	12.	Saroja
13.	Rasmiati S	13.	Warung Cemmi
14.	Hasnah Halik	14.	Simaru
15.	Hj. Nurhaedah	15.	Warung Nabila
16.	Nurhaedah	16.	Mallomo
17.	I Sappe	17.	Warung Putri
18.	Dina	18.	Warung Sedap
19.	Salmia	19.	Warung Amirah
20.	Aisya	20.	Warung Kembar

BIODATA PENULIS



Tzaza Aulia Syafira, akrab disapa caca, lahir di Parepare 12 Agustus 2001. Anak kedua dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Hadiman Asnandi dan Bismawati. Penulis mulai masuk pendidikan formal di SD IT Muslimat 1 Tarakan pada tahun 2007-2010 lalu berpindah ke UPTD SD NEGERI 135 Barru hingga 2013, kemudian melanjutkan ke bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 5 TARAKAN pada tahun 2013-2016 selanjutnya Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMK NEGERI 1 PAREPARE pada tahun 2016-2019. Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di

Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN PAREPARE), program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melakukan pengabdian masyarakat (KPM) di kecamatan Lembang desa Lemosusu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Kota Parepare. Selain kuliah penulis Aktif berorganisasi baik internal maupun eksternal kampus. Organisasi Internal kampus penulis pernah menjabat sebagai Anggota DEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan menjadi Wakil Ketua HMPS Ekonomi Syariah IAIN PAREPARE. Organisasi Eksternal Kampus kuliah pernah menjadi kordinator bidang riset dan literasi HIPMI Pare Komisariat Bandar Madani, Organisasi Forum Genre Parepare bidang penyuluhan, organisasi Senyum Anak Nusantara Chapter Parepare sebagai Sekretaris, Dan Student Debate Forum (STADIUM) Iain Parepare. Selain berorganisasi penulis juga aktif mengikuti berbagai perlombaan:

1. Juara 1 DUTA GENRE KOTA PAREPARE 2020
2. Juara 1 DUTA FEBI IAIN PAREPARE 2021
3. Juara 1 Debate Ilmiah Sc Mipa 2020
4. Juara 1 Lomba Debat Ekonomi Tingkat Nasional IEFEST 5 BANTEN 2020
5. Juara 3 Lomba Debat Tingkat Nasional BK Fisip Unwar 36 BALI 2020
6. Juara 3 Lomba Debat Osdifest 2021
7. Peserta Terbaik PETA Forum Genre 2019

8. Juara 2 Duta Genre tingkat zonasi
9. Public Speaker certified by Public Speaking Center Indonesia
10. Juara 2 Lomba Debat Nasional Ksei Youth Innovation Festival 2022
11. Juara 1 lomba Debat Ekonomi dan Perbankan Syariah Se-Sulawesi Selatan 2022.

Beberapa prestasi yang penulis sebutkan diatas diharapkan masih dapat bertambah. Selain aktif mengikuti organisasi penulis juga gemar menjadi Pemateri baik di internal kampus, kota, provinsi maupun nasional. Penulis mulai tahun 2020 bekerja sebagai Freelance Mc, Voiceover, dan Usaha kuliner hingga saat ini. Semoga setelah menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN PAREPARE) program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam penulis senantiasa berkembang, berprestasi dan yang terpenting menjadi manusia yang memberikan manfaat bagi sekelilingnya.

